

PENGEMBANGAN *TECHNOPRENEURSHIP* DI UNIVERSITAS RIAU

Sumarno¹, Saryono², Gimin³

¹Pendidikan Ekonomi, Universitas Riau, ²Ilmu Kimia, Universitas Riau,

³Pendidikan Ekonomi, Universitas Riau

sumarno.s@lecturer.unri.ac.id¹ gim_unri@yahoo.co.id² saryono_ur@yahoo.com³

Abstract

Nation or state will prosper if it have at least 2% of entrepreneurs. According to the Minister of Cooperatives and SMEs, entrepreneurs in Indonesia are still around 1.6%. For that, we need to develop technopreneurship in order to produce highly competitive entrepreneurs. The purpose of this research is to get information about technopreneurship development in University of Riau. The research was conducted on the application of entrepreneurship at University of Riau, Pekanbaru. Data were collected through interviews, observation, and documentation, analyzed descriptively. The results showed that the number of students who have a business plan in accordance with their academic disciplines on average only 5%. The factor is the implementation of technopreneurship development has not been optimal. Lecturers have not emphasized the creative ability of students in accordance with academic science, while entrepreneurship lecturers only instill knowledge, insight, and entrepreneurial interest. Units and support student entrepreneurship programs have not direct students' creative business ideas to the field that were appropriate to their academic sciences.

Keywords: *Entrepreneurship, Technopreneurship*

PENDAHULUAN

Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) ke-3 (tahun 2015-2019) memiliki arah pembangunan nasional yang menekankan pada pencapaian daya saing perekonomian berlandaskan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas. Untuk pencapaian tersebut, kebijakan strategisnya mencakup antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan, penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal, serta perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi (*technopreneurs*). Kebijakan strategis yang langsung

berkaitan dengan kewirausahaan di pendidikan tinggi yaitu meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, melalui strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi di dalam mata kuliah. Jati dan Priyambodo, (2015) mengungkapkan bahwa suatu negara akan mampu membangun apabila memiliki wirausahawan sebanyak 2% dari jumlah penduduk. Kebutuhan tersebut belum dipenuhi oleh Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM bahwa saat ini jumlah wirausahawan di Indonesia sekitar 1,6 persen, masih di bawah sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia maupun Thailand, yang masing-masing memiliki persentase

pengusaha sebesar 7 persen, 5 persen dan 3 persen Tugumalangnews (2016). Sejalan dengan perlunya pemenuhan jumlah wirausahawan tersebut, Handrimurthahjo (2013) menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan kebijakan baru yang mendorong semangat *entrepreneurship* agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sesuai kebijakan strategis nasional pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi dan untuk pemenuhan kebutuhan wirausahawan nasional, maka perlu dikembangkan *technopreneurship*.

Universitas Riau telah melakukan pengembangan kewirausahaan untuk mahasiswa sejak 1995. Pengembangan kewirausahaan mahasiswa dilaksanakan melalui pemberlakuan mata kuliah Kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib dan juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti pelatihan, permagangan, dan fasilitasi bantuan dana usaha mahasiswa. Pengembangan kewirausahaan akan dapat membantu perkembangan ekonomi bila mengarah pada *technopreneurship*. Oleh karena itu perlu dikaji bagaimana penerapan pengembangan *technopreneurship* di Universitas Riau yang telah lama mengembangkan kewirausahaan mahasiswa. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi tentang pengembangan *technopreneurship* atau pengembangan kewirausahaan berdasar ilmu pengetahuan akademik mahasiswa.

Berdasarkan hasil riset, wirausaha yang latar belakang akademiknya lebih tinggi diketahui lebih sering inovatif, menggunakan model bisnis yang modern, dan mendasarkan usaha mereka pada penggunaan teknologi baru Handrimurthahjo (2013). Hasil riset tersebut mengimplikasikan perlunya

pengembangan kewirausahaan melalui pendidikan di perguruan tinggi agar inovasi yang didasarkan penggunaan teknologi baru sering dilakukan sehingga produktivitas nasional selalu meningkat. Menurut Direktorat Akademik Ditjen Dikti Kemdiknas (2008), pendidikan pada negara maju ternyata mendasarkan basisnya pada kemampuan anak bangsa untuk mandiri dan berinovasi berbasiskan penciptaan teknologi sebagai keunggulan bersaingnya yang disebut dengan pendidikan berbasis *enterpreneurship* ataupun *technopreneurship*. Suparno, Hermawan, dan Syaib (2008) mengungkapkan bahwa *technopreneurship* merupakan gabungan dari teknologi (kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi) dengan kewirausahaan (bekerja sendiri untuk mendatangkan keuntungan melalui proses bisnis). Menurut Direktorat Akademik Ditjen Dikti Kemdiknas (2008), *technopreneur* mendasarkan ke-*enterpreneur*-nya berdasarkan keahlian yang berbasis pendidikan dan pelatihan yang didapatkannya di bangku perkuliahan ataupun percobaan pribadi. Jadi, *technopreneurship* dapat diartikan sebagai proses kemampuan kreatif dan inovatif melalui penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk menjalankan kegiatan yang memberikan nilai tambah bagi dirinya dan atau masyarakatnya. Menurut Handrimurthahjo (2013), Indonesia memiliki peluang mengembangkan *technopreneurship* untuk menciptakan nilai tambah khususnya bagi produk-produk pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Pentingnya *technopreneurship* bagi kemajuan/masa depan bangsa Indonesia menuntut diperlukannya pendidikan kewirausahaan

mahasiswa yang berbasis *technopreneurship*.

Pendidikan kewirausahaan menurut Rasmussen, Moberg, & Revsbech (2015) diartikan sebagai isi, metode, dan aktivitas yang mendukung pengembangan motivasi, kompetensi, dan pengalaman yang membuatnya memungkinkan untuk menerapkan, mengelola, dan berpartisipasi dalam proses pemberian nilai tambah. Program-program pendidikan kewirausahaan pada akhirnya ditujukan pada mempengaruhi perilaku kewirausahaan bagi masa depan individu dan pada peningkatan keberhasilan bisnis. Di perguruan tinggi tertentu, pendidikan kewirausahaan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap yaitu tahun pertama (*creativity program*), tahun kedua (*foundation program*), tahun ketiga (*establishing entrepreneurship program*) dan tahun ke-empat (*hatchery program*). Tahun pertama sampai tahun kedua, pesertanya adalah seluruh mahasiswa program studi manajemen/bisnis, sedangkan tahun ketiga dan tahun keempat pesertanya adalah mahasiswa terpilih yang memiliki karakter dan motivasi tinggi dalam kewirausahaan serta penetapan usaha baru (*start-up new venture*) Handrimurthahjo (2013). Kodrat dan Christina (2015) mengemukakan bahwa untuk menciptakan entrepreneur melalui pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Ciputra dilakukan melalui tahapan: 1) membangkitkan inspirasi mahasiswa untuk menanamkan pola pikir (dilakukan pada semester 1); melatih kemampuan melihat peluang, kreativitas, dan mengkalkulasikan risiko, keterampilan memimpin; dan mengembangkan jejaring bisnis mahasiswa (dilakukan pada semester 1 hingga semester 7). Untuk

melatih dan atau mengembangkan kreativitas, dapat dilakukan melalui 4P yaitu: 1) Pembentukan pribadi kreatif, 2) Motivasi Pendorong kreativitas, 3) Proses kreativitas, dan 4) Produk kreatif. Hasil penelitian Gasse dan Tremblay (2006) di Universitas Kanada menunjukkan bahwa menampilkan sikap positif terhadap kewirausahaan, mengungkapkan persetujuan program universitas dan media, menyajikan kewirausahaan sebagai gaya hidup, mempromosikan sukses kewirausahaan melalui pengakuan sosial dan kehormatan, memperkuat bakat, mengawasi keluar untuk kesempatan, dan termasuk penemuan, penemuan dan risiko dalam konten pedagogi, merupakan faktor-faktor yang akan membantu untuk mempromosikan kewirausahaan dan meningkatkan penggunaan kapasitas kreatif yang telah menjadi bagian dari lingkungan universitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan kewirausahaan di Universitas Riau yang mencakup perkuliahan kewirausahaan dan kegiatan-kegiatan dan unit aatu lembaga penunjangnya. Responden penelitian ini adalah pimpinan universitas, fakultas, jurusan/prodi, unit penunjang kegiatan kewirausahaan, dan dosen pengampu kewirausahaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan kewirausahaan dan pelaksanaannya; observasi untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan kuliah dan kegiatan pendukung kewirausahaan; sedangkan

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang hasil yang diperoleh dari kegiatan pendidikan kewirausahaan. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif baik kuantitatif maupun kualitatif dan juga teknik analisis rasio.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Kebijakan Pendidikan Kewirausahaan Mahasiswa

Pendidikan kewirausahaan mahasiswa di Universitas Riau telah menjadi kebijakan universitas, yaitu diadakannya Mata Kuliah (MK) Kewirausahaan yang bersifat Pilihan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Rektor tahun 1995. Untuk menunjang pendidikan kewirausahaan di tingkat universitas, dibentuk lembaga untuk mengelola dan menyelenggarakan program kegiatan kewirausahaan mahasiswa pada tataran universitas yang bernama Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P2K2). Penetapan Mata Kuliah Kewirausahaan dan pembentukan P2K2 sebagai pengelola dan penyelenggara program kegiatan kewirausahaan pada tataran universitas menunjukkan bahwa Universitas Riau telah mempersiapkan dan mengantisipasi pembangunan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengembangan pendidikan kewirausahaan mahasiswa.

Keterlaksanaan SK Rektor tentang Mata Kuliah Kewirausahaan di tingkat fakultas sudah baik, di mana 80% fakultas sudah mengarahkan jurusan/prodi yang ada untuk melaksanakan perkuliahan kewirausahaan. Di samping itu, sudah ada (25%) diantara fakultas tersebut yang mengadakan kegiatan pendukung perkuliahan kewirausahaan di tingkat

fakultas seperti bazar atau praktek kewirausahaan mahasiswa. Masih adanya fakultas (20%) yang belum menerapkan kebijakan adanya perkuliahan kewirausahaan dikarenakan status Mata Kuliah Kewirausahaan pada SK Rektor bersifat pilihan dan beban dari Mata Kuliah yang ada sudah sangat banyak. Selain alasan tersebut, fakultas juga memandang bahwa Mata kuliah Kewirausahaan tidak sesuai dengan substansi ilmu pengetahuan fakultasnya. Namun demikian, pimpinan fakultas memberikan kebebasan kepada mahasiswanya dan juga mendukung bila/untuk mengikuti kegiatan kewirausahaan pada tataran atau instansi lainnya. Jadi, sebenarnya secara informal seluruh (100%) fakultas yang ada sudah mendukung terselenggaranya pendidikan kewirausahaan mahasiswa.

Pada tingkat jurusan/prodi, kebijakan pendidikan kewirausahaan mahasiswanya sejalan dengan kebijakan fakultasnya. Semua jurusan/prodi yang ada di fakultas yang menyelenggarakan MK Kewirausahaan sebagai MK Wajib, mengikuti kebijakan fakultasnya, yaitu memasukkan MK Kewirausahaan dalam kurikulumnya. Status MK Kewirausahaan juga sebagai MK Wajib sehingga wajib atau harus diikuti oleh setiap mahasiswanya dan mereka harus lulus dalam menempuh mata kuliah tersebut. Di samping memasukkan MK Kewirausahaan sebagai mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswanya dan mereka harus lulus, diantara jurusan/prodi di lingkungan fakultas yang menerapkan kebijakan MK Kewirausahaan sebagai MK Wajib juga ada yang menyelenggarakan program kegiatan kewirausahaan bersama yaitu sejenis bazar atau gelar praktek

kuliah kewirausahaan mahasiswa sebagai pendukung perkuliahan kewirausahaan. Kegiatan bersama tersebut dilaksanakan secara bersama oleh beberapa jurusan/prodi yang ada. Kegiatan bazar atau praktek kewirausahaan mahasiswa bersifat kelompok, bukan individu mahasiswa, di mana setiap kelompok mahasiswa menyajikan produk untuk dijual. Produk yang disajikan/diusahakan oleh mahasiswa bersifat bebas, tidak dibatasi dengan ilmu pengetahuan akademik jurusan/prodinya, yang penting praktek menjalankan usaha untuk menerapkan/mendukung hasil kuliah kewirausahaan.

Jurusan/prodi di fakultas yang mengambil kebijakan seperti universitas, yaitu menjadikan MK Kewirausahaan sebagai MK Pilihan, diberi kebebasan oleh fakultas untuk memasukkan MK Kewirausahaan dalam kurikulumnya ataupun tidak. Atas kebijakan tersebut, diantara jurusan/prodi yang ada, beberapa jurusan/prodi ada yang menjadikan MK Kewirausahaan sebagai mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswanya dan mereka harus lulus, artinya kalau belum lulus harus mengulang dan ada juga jurusan/prodi yang tidak menjadikan MK Kewirausahaan sebagai MK Wajib atau tidak memiliki MK Kewirausahaan dalam kurikulumnya. Bagi jurusan/prodi yang memiliki MK Kewirausahaan dalam kurikulumnya, diwajibkanannya mahasiswa menempuh MK Kewirausahaan karena jurusan/prodi memandang/berpikir bahwa lapangan kerja pada masa sekarang ini sangat terbatas, sehingga kesempatan bagi lulusan harus diperluas dengan kompetensi/kemampuan lulusannya untuk dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri. Bagi jurusan yang

memiliki/menaungi beberapa prodi S1, ada juga jurusan yang memiliki program kegiatan kewirausahaan untuk mendukung perkuliahan kewirausahaan seluruh prodinya. Di samping untuk mendukung perkuliahan dan kegiatan kewirausahaan prodinya, kegiatan kewirausahaan tersebut juga dimaksudkan untuk mewadahi kegiatan-kegiatan kewirausahaan di tingkat jurusan sebagai lanjutan dari kegiatan kewirausahaan di tingkat prodi.

Selain jurusan/prodi yang memiliki MK Kewirausahaan dalam kurikulumnya, pada fakultas yang menerapkan kebijakan kewirausahaan sebagai MK Pilihan, ada juga jurusan/prodi yang belum/tidak memiliki MK Kewirausahaan dalam kurikulumnya, atau belum menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan secara ko-kurikuler. Alasannya sama dengan alasan fakultas yang belum/tidak memiliki program pendidikan kewirausahaan, yaitu beban kurikulum yang sudah banyak dan menganggap bidang jurusan/prodinya tidak sesuai dengan kewirausahaan. Walaupun tidak/belum memiliki kebijakan pendidikan kewirausahaan secara ko-kurikuler, tetapi memberikan kebebasan mahasiswanya bila ada yang mengikuti ataupun menjalankan kewirausahaan di tempat lain. Bahkan jurusan/prodi memberikan dukungan yang berupa persetujuan tertulis bila mahasiswanya memerlukannya.

Bagi jurusan/prodi yang fakultasnya belum/tidak memiliki kebijakan pendidikan kewirausahaan, semua jurusan/prodi yang ada juga belum/tidak memiliki kebijakan pendidikan kewirausahaan yang eksplisit. Namun demikian jurusan/prodi juga memberikan kebebasan kepada individu

mahasiswanya dalam atau untuk mengikuti kegiatan kewirausahaan yang diselenggarakan di tempat lain ataupun di tingkat universitas. Bahkan jurusan/prodi juga bersedia memberikan dukungan yang berupa persetujuan formal tertulis bila mahasiswanya memerlukannya.

Jurusan/prodi yang memiliki kebijakan pendidikan kewirausahaan belum mengarahkan pada pengembangan kewirausahaan yang sesuai bidang ilmu jurusan/prodinya. Hal ini berarti pengembang *technopreneurship* melalui kebijakan lembaga belum memadai.

2. Pelaksanaan Program Kegiatan Kewirausahaan dan Hasilnya

Program/kebijakan pendidikan kewirausahaan pada tataran universitas yang berkenaan dengan perkuliahan kewirausahaan dilaksanakan oleh fakultas atau jurusan/prodi yang ada di bawah naungan universitas. Karena status MK kewirausahaan menurut universitas bersifat pilihan, pelaksanaan perkuliahan kewirausahaan belum sepenuhnya direspon oleh fakultas, begitu juga jurusan/prodinya. Ada fakultas yang menjadikan MK Kewirausahaan sebagai MK Fakultas yang wajib dilaksanakan oleh jurusan/prodinya, ada juga fakultas yang menjadikan MK kewirausahaan sebagai MK Pilihan.

Program/kebijakan pendidikan kewirausahaan yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan non-perkuliahan kewirausahaan dilaksanakan oleh beberapa pihak atau unit di lingkungan universitas, seperti: Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P2K2), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WR III), Badan Pengelola Usaha (BPU), serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat (LPPM). Masing-masing pihak tersebut melaksanakan program sesuai porsinya, di mana P2K2 dan WR III menjalankan program kegiatan secara langsung berkaitan dengan kewirausahaan mahasiswa, sedangkan BPU dan LPPM melaksanakan program kegiatan yang sifatnya tidak langsung dalam menunjang kewirausahaan mahasiswa yaitu melalui kegiatan usaha yang dikelola BPU dan kegiatan penelitian dosen yang dikelola LPPM.

Kegiatan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh P2K2 merupakan kegiatan yang melibatkan mahasiswa pada tingkat dan lingkup universitas, yaitu dari berbagai jurusan/prodi/fakultas yang ada di lingkungan Universitas Riau (UR). Kegiatannya berupa pelatihan kewirausahaan, magang usaha atau Co-op UKM, lomba kewirausahaan, pemberian bantuan modal bergulir, dan mengikutkan mahasiswa wirausahanya dalam ajang expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) tingkat nasional. Kegiatan pelatihan kewirausahaan yang pernah dilaksanakan mencakup pelatihan pengembangan motivasi berwirausaha, pelatihan manajemen usaha, dan pelatihan penyusunan kelayakan/proposal usaha, serta pelatihan teknis usaha. Jumlah peserta kegiatan pelatihan selalu terpenuhi sesuai targetnya namun jumlah peserta yang memiliki rencana usaha sesuai bidang ilmu akademiknya rata-rata hanya sekitar 5%. Begitu juga peserta pada kegiatan pemberian bantuan modal bergulir, peserta yang memiliki rencana usaha sesuai bidang ilmu akademiknya rata-rata juga hanya sekitar 5%. Keberlanjutan usaha peserta yang menerima bantuan modal bergulir kurang dari 5%. Hal tersebut banyak disebabkan ketidakmampuan

mahasiswa dalam mengelola produk usahanya secara teknis.

Sementara ini kegiatan kewirausahaan mahasiswa yang ada di bawah koordinasi WR III yaitu kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa bidang Kewirausahaan (PKM-K) yang menyatu dalam PKM beserta PIMNAS-nya, serta Unit Kesejahteraan Mahasiswa yang berupa Koperasi Mahasiswa (Kopma). Peserta kegiatan PKM-K yang bidangnya sesuai ilmu akademiknya juga masih kurang dari 5%, begitu juga yang lolos ke PIMNAS. Unit kegiatan Kopma pada saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya sebagai wadah dan ajang mahasiswa untuk mengembangkan praktek kewirausahaannya. Bahkan unit tersebut praktek pelaksanaannya cenderung seperti unit kegiatan mahasiswa non kewirausahaan lainnya.

Pada fakultas yang menjadikan MK Kewirausahaan sebagai MK Wajib Fakultas, perkuliahan kewirausahaan dilaksanakan oleh semua jurusan/prodi yang ada. Pelaksanaan program kegiatan kewirausahaan non-perkuliahan, seperti bazar atau praktek kewirausahaan, pada fakultas yang menerapkan program/kebijakan ini juga dilaksanakan pada tingkat fakultas untuk menampung/mendukung perkuliahan dan kegiatan kewirausahaan yang telah dilakukan oleh jurusan/prodi. Kegiatan ini menjadi ajang memberikan/menambah pengalaman mahasiswa dalam praktek usaha, namun belum dikompetisikan secara profesional. Hasilnya, dilihat dari jumlah mahasiswa yang terlibat dapat dibilang 100% mahasiswa sudah terlibat. Tetapi bila dilihat dari jenis usaha yang ditaja oleh mahasiswanya, dapat dikatakan baru 5% yang sesuai dengan bidang ilmu

akademik jurusan/prodinya. Kendala yang dihadapi atas persoalan itu adalah sulitnya memaksakan mahasiswa untuk mempraktekan kreativitas dan inovasi dari ilmu akademiknya, dalam arti kalau dipaksakan seperti itu, mahasiswa justru tidak mengikuti kegiatan karena tidak memiliki kemampuan atau tidak bisa berkreasi dan berinovasi dari ilmu akademiknya. Hal ini terkait dengan tingkatan tujuan perkuliahan kuliah non-kewirausahaan yang belum sampai pada tataran tingkat tinggi atau level kreasi atau kognitif tingkat 6 (C-6). Di samping itu juga terkait dengan praktek kuliah non-kewirausahaan yang kurang/belum optimal disebabkan terbatasnya dana, sehingga kompetensi mahasiswa tidak sampai pada tingkat kreasi dalam ranah kognitifnya.

Pada tingkat jurusan/prodi yang fakultasnya menerapkan kebijakan Mata Kuliah (MK) Kewirausahaan sebagai MK Wajib, pelaksanaan pendidikan kewirausahaan yang berupa perkuliahan dituangkan dalam kurikulum jurusan/prodi sebagai MK Kewirausahaan dengan status MK Wajib juga. Bobot SKS untuk MK tersebut yaitu 2 (dua) SKS. Pada jurusan/prodi yang fakultasnya menerapkan kebijakan MK Kewirausahaan sebagai MK Pilihan, terbagi menjadi dua, yaitu ada jurusan/prodi yang menerapkan perkuliahan kewirausahaan dengan menetapkan MK Kewirausahaan masuk dalam kurikulum sebagai MK Wajib, ada juga jurusan/prodi yang tidak memasukkan pendidikan kewirausahaan dalam kurikulum (tidak ada kuliah kewirausahaan).

Pada jurusan/prodi yang menjadikan MK Kewirausahaan sebagai MK Wajib, ada jurusan yang membawahi beberapa prodi S1 yang melaksanakan kegiatan

pendukung perkuliahan kewirausahaan di tingkat jurusan seperti bazar atau praktek kewirausahaan. Pelaksanaan kegiatan kewirausahaan tersebut merupakan tindak lanjut setelah mahasiswa melaksanakan kuliah kewirausahaan dan kegiatan kewirausahaan lainnya di tingkat prodi. Hasil yang dicapai adalah munculnya semangat dalam kuliah kewirausahaan karena dalam kegiatan tersebut mahasiswa merasa senang serta adanya/bertambahnya pengalaman praktek berwirausaha, baik yang mulai dari memproduksi hingga menjual produknya maupun yang hanya menjual produk saja. Dilihat dari jenis produk yang diusahakan dalam kegiatan tersebut, ternyata sangat sedikit (rata-rata hanya 5%) yang merupakan produk sebagai hasil dari kreativitas dan inovasi ilmu akademik mahasiswanya. Kebanyakan mahasiswa hanya melakukan praktek wirausaha untuk produk yang mudah mendapatkan atau membuatnya tanpa mempertimbangkan ataupun mempraktekan ilmu akademiknya prodi/jurusannya.

MK Kewirausahaan yang diadakan dan dilaksanakan oleh jurusan/prodi pada umumnya yaitu (1) satu mata kuliah dengan bobot 2 (dua) SKS. Namun pada jurusan/prodi yang membidangi ilmu yang sangat dekat dengan kewirausahaan, yaitu jurusan/prodi dalam ilmu ekonomi atau bisnis, MK Kewirausahaan tidak hanya 1 (satu) melainkan ada beberapa MK yang masing-masing MK berkaitan dengan konsep dan atau teori tentang: sikap/jiwa kewirausahaan, perencanaan usaha, dan manajemen usaha. Manajemen usaha juga ada yang terbagi lagi dalam beberapa MK yang lebih spesifik seperti Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Sumber Daya Manusia dll.

MK Kewirausahaan yang diberikan oleh jurusan/prodi masih bersifat umum sekali, belum mengarahkan pada kewirausahaan berdasarkan bidang ilmu jurusan/prodinya. Begitu juga kegiatan-kegiatan kewirausahaan lainnya, belum ada pengarahan yang “mengharuskan” agar kegiatan kewirausahaannya menyesuaikan dengan ilmu jurusan/prodinya. Hasil dari keduanya belum banyak yang mendasarkan pada bidang ilmu jurusan/prodinya. Hal demikian menunjukkan pengembangan *technopreneurship* belum dilaksanakan secara memadai dan hasilnya masih sangat rendah.

Secara umum, program kebijakan pendidikan kewirausahaan dan pelaksanaan program kebijakan tersebut sudah ada dan berjalan cukup baik, namun belum optimal sebagai pengembangan *technopreneurship*, terlebih lagi bila dilihat dari hasilnya. Untuk mengoptimalkan kebijakan dan pelaksanaannya serta hasilnya tersebut, perlu adanya kebijakan sistemik yang memungkinkan terjadinya integrasi atau keterpaduan diantara dan antar komponen-komponen yang ada, baik komponen kurikuler non-kewirausahaan maupun komponen kewirausahaan, untuk saling melengkapi dan mengisi demi penciptaan dan atau peningkatan kompetensi wirausaha mahasiswa dan atau lulusan. Misalnya, jurusan/prodi membuat program/kebijakan non-kewirausahaan yang berupa pembentukan grup mahasiswa kreator dalam bidang ilmu akademik jurusan/prodi yang harus diperjuangkan oleh dosen-dosen MK bidang ilmu jurusan/prodi non-kewirausahaan. Kemudian jurusan/prodi juga membuat program/kebijakan kewirausahaan berupa

pembentukan mahasiswa inovator atau wirausaha berbasis kreativitas bidang ilmu jurusan/prodi, yang harus diperjuangkan oleh dosen kewirausahaan. Untuk melengkapi kedua program/kebijakan tersebut prodi juga harus membuat program kegiatan non-kuliah yang mewadahi kegiatan berkreasi dan berinovasi bagi mahasiswanya, misalnya program/kebijakan “hari kreativitas-inovasi jurusan/prodi”. Program/kebijakan pendukung kewirausahaan itu penting untuk menghasilkan lulusan sebagai wirausahawan, seperti diungkapkan Handrimurthahjo (2013) bahwa untuk membekali mahasiswa dalam bidang kewirausahaan harus dilengkapi dengan program atau kegiatan pendukung kewirausahaan. Begitu juga Galus (2009) yang menyatakan bahwa program pengembangan kewirausahaan diharapkan menjadi wahana pengintegrasian secara sinergi antara penguasaan sains dan teknologi dengan jiwa kewirausahaan. Ketiga program/kebijakan tersebut harus terpadu menjadi sebuah paket program/kebijakan, baik pada tingkat jurusan/prodi, fakultas, maupun universitas, sehingga pada masing-masing tingkat ada grup mahasiswa kreator-inovator dan atau wirausaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan seperti berikut:

1. Kewirausahaan mahasiswa di Universitas Riau telah diterapkan cukup baik, tetapi belum mengarah pada pengembangan *technopreneurship* secara memadai, baik dalam kebijakan

pengembangan kewirausahaan maupun dalam kegiatan-kegiatan kewirausahaannya.

2. Universitas dan sebagian fakultasnya serta jurusan/prodinya sudah memiliki kebijakan kewirausahaan berupa adanya Mata Kuliah Kewirausahaan dan kegiatan-kegiatan kewirausahaan lainnya. Namun isi perkuliahan dan kegiatan tersebut belum mengarah secara memadai kepada pengembangan *technopreneurship*.
3. Pengembangan *technopreneurship* muncul secara tidak terencana, sehingga jumlah mahasiswa kategori *technopreneur* masih sangat sedikit.

Sesuai hasil penelitian dan pembahasan, untuk terlaksananya pengembangan *technopreneurship* yang lebih memadai, diberikan saran seperti berikut:

1. Isi Mata Kuliah Kewirausahaan pada jurusan/prodi, hendaknya memiliki kaitan erat dengan bidang ilmu jurusan/prodi. Begitu juga kegiatan kewirausahaan lainnya
2. Pelaksanaan perkuliahan dan kegiatan kewirausahaan lainnya harus mengarah pada kesesuaian dengan bidang ilmu jurusan/prodinya .
3. Perlu peningkatan koordinasi, integrasi, dan kolaborasi antar komponen untuk mengarah pada pengembangan *technopreneurship* mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Akademik Ditjen Dikti
Kemdiknas. 2008.
Technopreneurship.
www.undana.ac.id/index.php?option=com...view...pdf. Diakses 10 April 2016..
- Handrimurthahjo, Agustinus Dedy. 2013. Model Pembelajaran Kewirausahaan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Universitas Paramadina* Vol. 10 No. 2 Agustus 2013, h 729-755. Diakses 10 April 2016
- Jati, Bambang M.E. dan Priyambodo, Tri K. 2015. *Kewirausahaan: Technopreneurship untuk Mahasiswa Ilmu-ilmu Eksakta*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kodrat, David S. Dan Christina, Wina. 2015. *Entrepreneurship: sebuah ilmu*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rasmussen, Anders; Moberg, Kåre dan Revsbech, Christine. 2015. *A Taxonomy Of Entrepreneurship Education: Perspectives On Goals, Teaching And Evaluation*. URL: <http://eng.ffe-ye.dk/knowledge-centre/entrepreneurship-education/taxonomy>. Diakses 10 April 2016.
- Suparno, Ono. Hermawan, Aji. dan Syuaib, M. Faiz.2008. *Technopreneur*. Recognition and Mentoring Program-Institut Pertanian Bogor (RAMP-IPB). <http://ono.suparno.staff.ipb.ac.id/articles/technopreneurship-2/>. Diakses 10 April 2016.
- Tugumalangnews.com. 2016. *Jumlah Wirausahawan Indonesia Masih 1.6 Persen*. in Berita, Ekonomi, Headline March 24, 2016. <http://www.tugumalangnews.com/jumlah-wirausahawan-indonesia-masih-1-6-persen/>. Diakses 10 April 2016.